RENJA AWAL 2024
(RENCANA KERJA AWAL)

DINAS KESEHATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah. Renja PD Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen yang secara substansi menerjemahkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 – 2026.

Sebagai suatu produk perencanaan, Renja tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi, keberadaan Renja dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Gambar .... Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

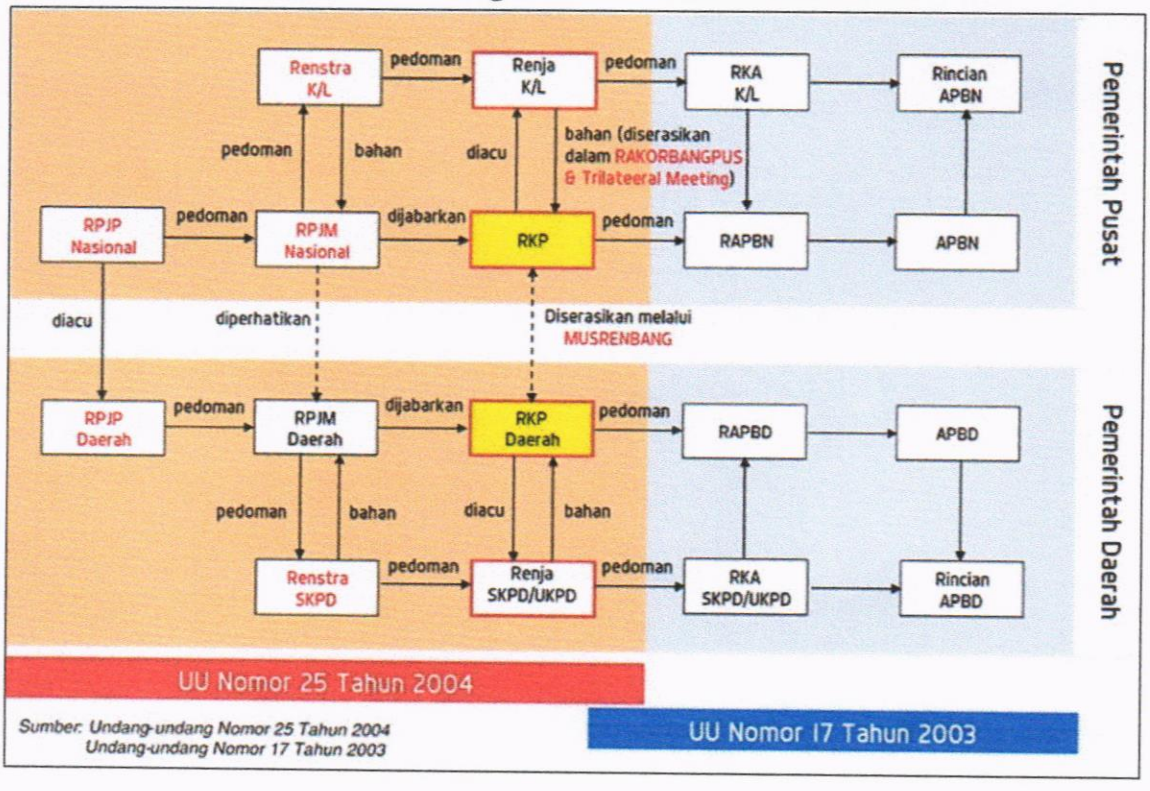

Dokumen Renja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 disusun melalui pendekatan:

1) ***top down***, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional;
2) ***bottom up,*** yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi;
3) ***partisipatif***, pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat;
4) ***politik***, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; dan

5) ***teknokratik***, pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.

Adapun Implementasi *money follow priority programs* yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja. Hal tersebut didukung juga dengan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu melaui SIPD Provinsi Sulawesi Utara.

Renja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2023 serta dinamika lingkungan yang terjadi diantaranya dampak sosial dan ekonomi dari Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemic global.

Adapun beberapa Isu Strategis Pembangunan Kesehatan Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Utara, yakni: 1) Tercapainya SPM; 2) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 4) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; 5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; 6) Meningkatnya responsivitas system kesehatan; dan 7) Menurunnya prevalensi stunting.

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, dilaksanankan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yang diselenggarakan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Merumuskan rancangan akhir Renja; dan
6. Penetapan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan adalah:

1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peratuaran Pemerintahan Penganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor);

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13) Keputusan Menteri Kesehatan No. 374/Menkes/SK/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15) Instruksi Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
17) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
18) Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulaweis Utara Tahun 2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program kerja Dinas Kesehatan dan terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang (tahun 2024) melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan adalah:

1) Mendiskripsikan tentang program-program yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2) Menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun berjalan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatan;
3) Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan daerah;

4) Menjadi dasar bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5) Meningkatkan sistem surveilans dan sistem informasi kesehatan dalam rangka mendukung perencanaan berbasis data dan informasi yang akurat; dan
6) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2023. Evaluasi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan untuk melihat: (1) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (2) Kegiatan yang yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; dan (3) Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan beserta Bidang dan UPTD yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara s.d. 2022 sebagaimana tabel terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada dasarnya upaya pembangunan di bidang kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkualitas serta, terjangkau. Beragamnya kondisi lingkungan, sosial ekonomi serta perilaku antar daerah, menyebabkan adanya keragaman faktor risiko serta permasalahan kesehatan yang pada muaranya menyebabkan adanya perbedaan derajat kesehatan masyarakat.

Upaya pelayanan kesehatan dan intervensi program dalam menekan risiko permasalahan kesehatan selalu dikembangkan sejalan dengan perkembangan teknologi serta kondisi masyarakat. Walaupun dari waktu ke waktu hasilnya menunjukan peningkatan kearah yang lebih baik, namun sangat disadari bahwa peningkatan dimaksud belum sepenuhnya dapat dicapai diseluruh wilayah maupun program kesehatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pembangunan di sektor kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggitingginya. Hal ini membutuhkan dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat. Berdasarkan data BPS Prov. Sulut jumlah tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 berjumlah 14.636 jiwa.

Isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan kesehatan di daerah Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada dinamika perubahan lingkungan strategis, kondisi daerah serta kebijakan nasional yang berpangaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

Beberapa Isu Strategis Pembangunan Kesehatan Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Utara, yakni: 1). Pencapaian target Vaksinasi COVID 19 serta pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat; 2). Penanganan kesehatan atas dampak Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19); 3) Tercapainya SPM; 4) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 5) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 6) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; 7) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; 8) Meningkatnya responsivitas system kesehatan; dan 9) Menurunnya prevalensi stunting.

Adapun beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah urusan kesehatan, sebagai berikut:

a. Prevalensi penyakit menular di antaranya malaria, TBC, diare, dan DBD masih tinggi;
b. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih tinggi;
c. Kecenderungan meningkat HIV / AIDS;
d. Kualitas tenaga, fasilitas dan infrastruktur kesehatan belum memadai serta distribusinya yang belum merata terutama di daerah kepulauan;
e. Kasus balita gizi kurang masih ada;
f. Penduduk dengan asupan kalori di bawa tingkat komsumsi minuman 2100 kkal/kapita/hari masih ada;
g. Biaya kesehatan meningkat secara signifikan sehingga menyulitkan masyarakat "hampir miskin" yang tidak mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk mengakses pelayanan kesehatan yang baik;
h. Alokasi Jamkesmas sering belum tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang berhak tidak memperolehnya. Sebaliknya masyarakat yang berhak tidak memperolehnya;
i. Keengganan di kalangan penyedia jasa kesehatan untuk melayani masyarakat miskin dan hamper miskin masih ada;
j. Kalagangan penyedia jasa kesehatan yang mengharuskan uang jaminan terlebih dahulu sebelum melayani pasien masih banyak;

k. Minat tenaga medis khususnya tenaga ahli untuk di tempatkan di daerah-daerah atau terpencil makin meningkat;
l. Berbagai jenis penyakit baru muncul sebagai akibat perubahan gaya hidup dan pencemaran lingkungan makin meningkat;
m. Kesadaran pola hidup sehat dan sanitasi lingkungan pada sebagian masyarakat terutama di kalangan Pendidikan rendah, miskin, dan menempati daerah kumuh masih rendah.
n. Prevalensi penyakit tidak menular di antaranya penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes, dan penyakit paru Obstruktif kronis (PPOK) makin tinggi;
o. Angka harapan hidup masih rendah khususnya di kab Bolaang Mongondow Selatan;
p. Masih ada kasus kabupaten/Kota yang kasus Stunting masih tinggi;
q. Kurangnya imunisasi lengkap pada anak;
r. Masih kurangnya akan prilaku mencuci tangan dengan benar;
s. Menurutnya daya komsumsi buah dan sayur bagi masyarakat;
t. Kurang pahamnya akan pengelolaan sampah rumah tangga;
u. Sulitnya mengakses fasilitas pelayanan kesehatan (Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Minahasa Tenggara);
v. Perlu kesiapan daerah Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi puskesmas dengan sistem informasi elektronik, agar komunikasi mengenai data dan fasyankes terkecil dapat di akses dengan cepat sampai kepusat;
w. Terbatasnya ketersediaan sarana kesehatan dan saran pendukung seperti alat-alat kesehatan seperti infrastruktur;
x. Perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat agar secara mandiri dapat meningkatkan derajat kesehatannya; dan
y. Masih kurangnya kerjanya jumlah Puskesmas yang terakreditasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Renja

Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2024 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2022 – 2026, SDG's dan SPM-Kesehatan. Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Untuk menjawab setiap kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dibidang kesehatan maka Dinas Kesehatan nanti akan melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengakomodir setiap usulan yang ada, yang pada intinya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Usulan program dan kegiatan masyarakat pada dasarnya masih akan dibahas dalam pelaksanaan Forom Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Provinsi yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April Tahun 2023.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah RKP kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada RPJMN sebelumnya RKP difokuskan pada Sumberdaya Manusia yang memang sangat dibutuhkan untuk peningkatan daya saing ekonomi sekaligus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. RPJMN berikutnya masih akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, sehingga tema RKP pada tahun 2022 yaitu "Rerformasi Sosial, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur sebagai Landasan Untuk Mmempercepat Pemulihan Ekonomi".

Sebagai penjabaran RPJMN 2020-2024, maka Tema RKP Tahun 2021 adalah "Rerformasi Sosial, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur sebagai Landasan Untuk Mmempercepat Pemulihan Ekonomi", dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 maka arah kebijakan dan program prioritas bidang kesehatan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Daerah provinsi harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10% (diluar belanja pegawai dan DAK);
3. Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
4. Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10% (diluar belanja pegawai dan DAK);
5. Memfasilitasi pembinaan, pemantauan evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran dalam program pencegahan stunting;
6. Pemerintah provinsi membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada;
7. Memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kab/kota;
8. Mengkoordinir perlibatan institusi non pemerintah;
9. Melaksanakan penilaian kinerja kab/kota termasuk memberikan umpan balik serta penghargaaan kepada kab/kota sesuai kapasitas provinsi;
10. PMT pemulihan untuk ibu hamil KEK;
11. Pemberian IFA/tablet tambah darah bagi ibu hamil;
12. Kelas ibu hamil;
13. PMT bagi balita;
14. Penguatan fasilitas bagi Posyandu;

15. Pelayanan ante natal ibu hamil;
16. Pelayanan post natal ibu bersalin;
17. Pemberian Vitamin A pada anak 6-59 bulan;
18. Imunisasi Dasar lengkap;
19. Pencegahan dan Penanganan kecacingan pada balita;
20. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;
21. Promosi penggunaan jamban Sehat dan cuci tangan pakai sabun;
22. Dukungan fortifikasi pangan;
23. Penanganan balita gizi buruk;
24. Pembinaan MTBS pada Puskesmas;
25. Pencegahan malaria pada ibu hamil (daerah endemis);
26. Penanganan ibu hamil positif HIV;
27. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan pemenuhan SDM kesehatan;
28. Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM kesehatan;
29. Memperhatikan jalur distribusi obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman;
30. Memastikan ketersediaan obat (buffer stock);
31. Memperhatikan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan evaluasi produksi sampai distribusi makanan minuman yang beredar di masyarakat;
32. Melakukan Peningkatan Koordinasi pembinaan pengawasan ketersediaan alat kesehatan, obat, vaksin dan makanan;
33. Memperhatikan target pencapaian SPM (100%) bagi ibu hamil untuk pemberian zat besi (Fe) sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berlaku;
34. Memperhatikan NSPK yang ditetapkan oleh K/L terkait;
35. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN;
36. Daerah provinsi dan kab/kota harus mengalokasikan untuk penyusunan kebijakan di daerah dalam mendukung program Germas dalam bentuk Perkada (Pergub/Perwalkot/Perbub;
37. Perlu kolaborasi, partisipasi, dan collective action stakeholder secara terpadu dan terintegrasi;
38. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai universal health coverage (UHC) sesuai target nasional; dan
39. Bagi daerah yang memiliki perguruan tinggi kesehatan dapat mengalokasikan anggaran untuk proses belajar mengajar dan kegiatan operasional selama tahun 2022.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026.

Dalam rangka memahami dan mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka diperlukan penelaahan yang tepat. Pemahaman visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan Sulawesi Utara tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 yaitu:

Gambar 3.1
Visi dan Misi Sulawesi Utara

Tahun 2021-2026

Makna yang terkandung dalam Visi ini terdiri dapat dipaham dari 3 (tiga) kata dan/atau kalimat kunci yaitu:

1. Maju
2. Sejahtera
3. Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Visi 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN (tegak lurus) dan arahan tahapan pelaksanaan untuk pencapaian Visi Pembangunan Sulawesi Utara dalam RPJPD 2005-2025. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara, Visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Aktualisasi pokok-pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Maju

Ukuran "**Maju**" ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi daerah.
2. Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah.
3. Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang.
4. Memiliki Litbang yang handal.
5. Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental.

Sejahtera

Ukuran "**Sejahtera**" ditunjukkan oleh:

1. Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing.
3. Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19.

Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Ukuran "**Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik**" ditunjukkan oleh:

1. Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan.

2. Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik.

3. Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (*Meeting, Insentives, Conference and Exebition*), tujuan studi, pengembangan ilmu dan teknologi.

4. Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama regional, bilateral dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.

5. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara.

Tabel 3.2 Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

MISI 1	Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara
MISI 2	Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa
MISI 3	Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas
MISI 4	Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Lingkungan
MISI 5	Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas Antar Daerah

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terkait dalam Misi ke-1, yakni: " Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara. "

Tujuan dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan adalah mewujudkan SDM yang sehat dengan derajat kesehatan dan gizi yang tinggi sebagai bagian dari upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan kategori capaian kinerja yang dilaksanakan, sebagai berikut:

A. Menurunnya kematian ibu melahirkan dan kematian anak/balita

Pada dasarnya upaya pembangunan dibidang kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan

dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan diantaranya adalah Jumlah kematian ibu, Jumlah kematian bayi serta masalah gizi masyarakat.

a. Indikator Jumlah Kematian Ibu, Kematian ibu merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek, baik aspek klinis, aspek sistem pelayanan kesehatan, maupun faktor-faktor non kesehatan yang mempengaruhi pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi dan pengertian dari semua pihak mengenai pentingnya dan peran berbagai aspek dalam penanganan masalah kematian ibu sehingga strategi untuk mengatasinya harus merupakan integrasi menyeluruh bagi semua pihak. Indikator Kematian Ibu ini menggunakan angka absolut peristiwa kematian ibu yang didasarkan atas laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dimana jumlah kematian ibu tahun 2019 sebanyak 51 kasus atau terjadi penurunan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 52 kasus menjadi 51 kasus dan capaian ini masih dibawah target 2019 yaitu 60 kasus dengan nilai realisasi kinerja sebesar 115 %;
b. Indikator Jumlah Kematian Bayi, Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan juga oleh kasus kematian bayi. Jumlah Kematian bayi tahun 2019 termasuk dalam kategori berhasil dimana terdapat 250 kasus kematian bayi dengan capaian kinerja sebesar 103 %. Pencapaian kinerja ini termasuk dalam kategori berhasil dimana masih dibawah target kinerja tahun 2019 sebesar 260. Sejak Tahun 2016, Jumlah kematian Bayi di Provinsi Sulawesi Utara berfluktuasi, namun secara keseluruhan, capainnya sudah lebih rendah dari target nasional dan target yang ditetapkan Provinsi Sulawesi Utara. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 250 kasus, dan tahun 2017 sudah menurun tajam menjadi 219 kasus, dan sampai dengan tahun 2019 jumlah kematian bayi tetap tidak melewati target yg ditetapkan.
c. Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah jumlah kasus balita gizi buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat dibagi jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%. Kinerja penanganan kasus balita gizi buruk dinilai jika seluruh balita gizi buruk yang ditemukan mendapat perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan sesuai tatalaksana gizi buruk di fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat Persentase balita Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting (gizi buruk) balita di Indonesia berada di angka 30,8 persen, turun 6,4 persen dari tahun 2013. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari angka minimum stunting yang ditetapkan WHO, yakni 20 persen. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indikator persentase Balita gizi buruk mendapat perawatan termasuk dalam kategori capaian kinerja berhasil dimana mencapai target dalam perjanjian kinerja sebesar 100%. Secara umum realisasi capaian target kinerja Indikator ini setiap tahun mencapai target dalam perjanjian kinerja. Jika dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya, sasaran strategis 1

setiap tahun mengalami peningkatan kinerja yang sangat baik dimana sejak tahun 2016 kasus kematian ibu dan kasus kematian anak diprovinsi sulawesi terus menurun.

B. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Terakreditasi

Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas. Salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesempurnaan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan adalah akreditasi.

Untuk menilai capaian kinerja sasaran strategi meningkatnya mutu pelayanan kesehatan digunakan indikator kinerja Presentase Fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Untuk tahun 2019 indikator ini termasuk dalam kategori berhasil dimana, terdapat realisasi kinerja 100%. Fasilitas pelayanan kesehatan itu antara lain : Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit).

Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang terakreditasi adalah Puskesmas yang telah memiliki sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi atau Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Capaian tahun 2019 termasuk dalam kategori berhasil dimana capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan yaitu 57 puskesmas dari 56 puskesmas, dan sampai dengan tahun 2019 sudah terakreditasi 169 Puskesmas dari total 195 Puskesmas di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, selain adanya upaya promotif dan preventif juga diperlukan upaya kuratif dan rehabilitative yang diperoleh melalui Rumah Sakit (RS) dan sarana prasarana kesehatan lainnya. Untuk itu perlu adanaya peningkatan mutu kinerja sarana pelayanan kesehatan dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat melalui akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit.

C. Meningkatnya Usia Harapan Hidup

Sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks pembangunan Manusia (IPM) terkait dimensi ukuran kualitas hidup, Angka Harapa Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) Sulawesi Utara pada tahun 2020 sebesar 71,69 tahun. Artinya setiap bayi yang dilahirkan hidup pada tahun ini akan mempunyai peluang hidup hingga usia 71-72 tahun. AHH menggambarkan kemampuan bertahan hidup seseorang yang erat kaitannya dengan derajat kesehatannya. Semakin tinggi AHH berarti semakin berhasilnya pembangunan kesehatan di suatu wilayah. AHH Sulawesi Utara selalu menunjukkan tren meningkat, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik.

Tabel 2.43 Perkembangan AHH Tahun 2018 s/d 2021 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	AHH			
		2018	2019	2020	
1	Bolaang Mongondow	68,86	69,22	69,36	
2	Minahasa	70,67	70,98	71,08	
3	Kepulauan Sangihe	69,60	69,96	70,10	
4	Kepulauan Talaud	69,71	70,04	70,16	
5	Minahasa Selatan	69,47	69,80	69,92	
6	Minahasa Utara	71,03	71,31	71,38	
7	Bolaang Mongondow Utara	67,21	67,54	67,66	
8	Kepulauan Sitaro	70,14	70,54	70,73	
9	Minahasa Tenggara	69,77	70,07	70,15	
10	Bolaang Mongondow Selatan	64,19	64,45	64,49	
11	Bolaang Mongondow Timur	67,51	67,81	67,89	
12	Kota Manado	71,52	71,80	71,87	
13	Kota Bitung	70,72	71,00	71,07	
14	Kota Tomohon	71,43	71,79	71,93	
15	Kota Kotamobagu	69,97	70,33	70,47	
	SULAWESI UTARA	71,26	71,58	71,69	

Sumber: BPS Prov. Sulut, 2021

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan dan menetukan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan, sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pencapaian target SDGs, terdapat beberapa Tujuan/Goals yang terkait dengan urusan kesehatan, sebagai berikut:
   - Goal 2, Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (Gizi Masyarakat);
   - Goal 3, Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia (Sistem Kesehatan Nasional);
   - Goal 5, Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (Akses Kespro dan KB); dan
   - Goal 6 Menjamin Ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (Sanitasi dan Air Bersih).

2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan juga menjadi salah satu pertimbangan. Program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus mendongkrak capaian indikator SPM terhadap target 100% yang telah ditetapkan.

   SPM bidang kesehatan Pemerintah Provinsi terdiri atas:

a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

3. Isu Strategis Pembangunan Kesehatan Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:
   a. Penanganan kesehatan atas dampak Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
   b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
   c. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
   d. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan Kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan;
   e. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin;
   f. Meningkatkan responsivitas system kesehatan; dan
   g. Menurunkan prevalensi stunting.

Program – Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara yang di usulkan tahun anggaran 2022, terdiri atas program pokok dan program penunjang yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sebagai berikut:

- **Program Penunjang:**

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Kegiatan penataan kerasipan
   b. Kegiatan Penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian
   c. Kegiatan Penyediaan kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
   d. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan administrasi Keuangan
   e. Kegiatan Penyediaan kebutuhan administrasi umum
   f. Kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat
   a. Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Gedung kantor
   b. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
   c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
   e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   f. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
   g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor

1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
   b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
   b. Sinkronisasi peningkatan inovasi pelayanan publik

3) Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
   a. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
   b. Penyusunan laporan bulanan SKPD

c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD
d. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

4) Program Perencanaan SKPD

a. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
b. Penyusunan Rencana kerja Anggaran
c. FGD lintas program/sector/kab/kota
d. Penyusunan Rencana Strategis SKPD

➢ **Program Prioritas:**

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular

a. Pembinaan Kab/Kota Dalam aselerasi Eliminasi Kusta
b. Pembinaan Kab/Kota dalam skrining filariasis
c. Pembinaan Kab percontohan Desa Sahabat Kusta
d. Workshop Penguatan Public Private Mix Tkt Kab/Kota
e. Pembinaan Kader dalam pengendalian TB
f. Sosialisasi dan Advokasi pemberian obat pencegahan masal kecacingan
g. Pelaksanaan pemberian obat dan pencegahan masal

6) Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)

a. Pengadaan Logistik PTM
b. Deteksi Dini Kanker
c. Workshop Penggerakan Masyarakat dalam Pengendalian penyakit tidak menular
d. Pelatihan pencegahan dan Pengendalian gangguan Indera untuk tenaga kesehatan
e. Deteksi Dini kesehatan mental (anda tidak sendiri)

9) Program Penanggulangan Wabah dan Bencana

a. Penguatan Manajemen program pengendalian wabah dan bencana
b. Pengendalian vector penyakit bersumber binatang (foging, PSN, Indoor,Residual,Spraying)
c. Pembinaan Kab/Kota dalam penerapan 1 rumah Jumantik
d. Pengadaan vaksin dan logistic penyakit menular
e. Pembinaan Kab/Kota dalam eliminasi malaria
f. Evaluasi dan Validasi data program pencegahan dan pengendalian penyakit menular
g. Pemantapan koordinasi penanggulangan Krisis Kesehatan antara Provinsi dan Kab/Kota
h. Rapat Koordinasi Kluster Kesehatan 2x Setahun
i. Workshop penanggulangan Krisis Kesehatan
j. Pengadaan logistic Krisis Kesehatan (boot, sarung tangan, masker, helm, emergency kit, kantong mayat, senter, dll)
k. Perjalanan dinas dalam rangka Rapid health asseement saat bencana
l. Perjalanan dinas dalam rangka distribusi logistic Krisis Kesehatan

10) Program Kesehatan Haji

a. Surveilance terhadap K3JH di Puskesmas
b. Evaluasi kesehatan haji bidang kesehatan diembarkasi haji Balikpapan
c. Bimbingan teknis untuk pemeriksaan kesehatan Jemaah haji

11) Program Surveilans dan Imunisasi

a. Bimtek SKDR, surveillance, PD3I, STP Rutin dan KLB
b. Pengiriman dan pemeriksaan specimen penyakit menular yang sedang terjadi KLB
c. Pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah
d. Pelaksanaan verifikasi sinyal kewaspadaan dini dan PIE
e. Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sector terkait pelayanan imunisasi
f. Penemuan kasus discarded campak
g. Penyelidikan epidemiologi (PE) KLB serta wabah dan PIE
h. Pertemuan surveillance berbasis masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini respon

12) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Akreditasi Rumah Sakit, laboratorium kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya
b. Bimbingan teknis akreditasi RS
c. Pertemuan evaluasi pelaksanaan system rujukan di Provinsi
d. Pertemuan validasi data RS dan SIRS
e. Bimbingan teknis akreditasi laboratorium kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya
f. Pendampingan pelaksanaan akreditasi RS
g. Pendampingan pelaksaanan akreditasi laboratorium dan fasilitas kesehatan lainnya
h. Evaluasi system rujukan
i. Monitoring evaluasi dan pelaporan tim anti fraud pelayanan kesehatan
j. Validasi SDM, sarana prasarana, alat kesehatan dalam penetapan/perpanjangan izin operasional RS
k. Evaluasi RS Rujukan regional dan rujukan Provinsi
l. Bimbingan teknis pelaksanaan unit transfuse darah RS dan UPTD Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan lainnya
m. Bimbingan teknis penerapan RS saying ibu-bayi
n. Koordinasi program perumahsakitan tingkat pusat
o. Pengawasan RS oleh BPRS
p. Pemilihan tenaga kesehatan teladan
q. Monitoring evaluasi dan pelaporan program kesehatan primer dan tradisional
r. Penilaian Puskesmas berprestasi
s. Pelayanan kesehatan medical center event event nasional,internasional,dan daerah
t. Pembinaan Kesehatan tradisional di kab/kota
u. Fasilitas pelayanan kesehatan di DTPK
v. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin

13) Program pelayanan umum kesehatan poliklinik

a. Pelayanan Poliklinik

14) Program Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan Kegawat Daruratan Terpadu

a. Workshop system penanggulangan kegawat daruratan terpadu
b. Advokasi survey dan pelaporan
c. Sosialisasi Koordinasi dan Konsultasi PSC 119
d. Operasionalisasi PSC 119
e. Pelayanan social kemasyarakatan

f. Pelayanan kesehatan gawat darurat pada masyarakat

15) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Workshop pembinaan pendampi akreditasi puskesmas Kab/Kota dalam rangka implementasi system akreditasi SIAF
b. Workshop pembinaan standarisasi sarana dan prasarana serta alkes bagi puskesmas
c. Monitoring dan evaluasi akreditasi Puskesmas

16) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

a. Workshop peningkatan kapasitas petugas penanggung jawab program keluarga di kab/kota
b. Bimtek di kab/kota program PIS PK

17) Program JKN

a. Kegiatan advokasi menuju Universal Health Coverage
b. Koordinasi pola pembayaran kapitasi FKTP
c. Penguatan SDM selaku pengembangan pembiayaan JKN/KIS dalam PHA/DHA
d. Pertemuan JKN Tingkat RS Kab/Kota
e. Pertemuan koordinasi LS/LP tingkat provinsi/Kab/Kota
f. Penguatan tenaga coder RS dalam INA CBG's
g. Koordinasi JKN Tingkat Pusat
h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program JKN
i. Penanganan Sengketa dan pencegahan Fraud JKN

18) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Sosialisasi/Kampanye tentang PP ASI ekslusif TTU
b. Pelacakan remaja puteri anemia disekolah
c. Sinkronisasi peta informasi masyarakat kurang gizi
d. Pemberian tambahan makanan dan vitamin pada balita gizi buruk
e. Pergerakan/Refreshing kader posyandu
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
g. Pemetaan deteksi dini stunting dan kurang gizi

19) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pembinaan wilayah/kawasan sehat (sulut satu peta)
b. Orientasi kesehatan olahraga hipertensi
c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
d. Orientasi kesehatan olahraga senam jantung sehat
e. Penyuluhan menciptakan jantung sehat
f. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat di daerah kumuh
g. Pelatihan kesehatan olahraga bagi petugas puskesmas
h. Pengkajian pengembagan lingkungan sehat
i. Integrasi program kesehatan olahraga dan dinas pendidikan

20) Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
b. Pemberdayaan masyarakat dalam penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
c. Pembuatan pengadaan media penyuluhan dan promosi kesehatan
d. Pameran Pembangunan kesehatan di Provinsi

21) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak dan Balita

a. Penanganan program kesehatan mental anak kurang mampu dan miskin

b. Screening bayi baru lahir keluarga miskin

22) Program Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia

a. Jambore Lansia
b. Pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi lansia

23) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

a. Sosialisasi Program PPIA (Pencegahan Penularan HIV AIDS ibu ke anak) bagi kab/Kota dari Puskesmas
b. Pelaksanaan ANC terintegrasi bagi kab/kota dari Puskesmas
c. Pemantapan program perencanaan persalinan dan percepatan Komplikasi (P4K) dan pemilihan pelayanan P4K terbaik
d. Peningkatan kapasitas petugas KIA dalam deteksi Resiko ibu hamil

24) Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

a. Updating, Dokumentasi dan Deskripsi data
b. Rapat kerja organisasi profesi
c. Fasilitas ABK Kesehatan
d. Rapat Kerja Kesehatan Daerah
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
f. Penyusunan Kajian Strategis pemerataan tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara

25) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a. Sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah
b. Pengadaan perlengkapan kantor dan sarana gudang obat
c. Pembinaan pada pengelola obat dan perbekalan kesehatan
d. Monev sarana pelayanan kefarmasian dan distribusi obat dan alkes
e. Pengawasan alkes dan pangan
f. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KESEHATAN						**144.103.746.022,00**							**147.188.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**144.103.746.022,00**							**147.188.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**144.103.746.022,00**							**147.188.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Presentase terlaksananya Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi***				**100 %**	**115.425.298.745,00**							**117.953.000.000,00**	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Daerah*				100 %	110.478.541.296,00			-	-	-		112.555.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1250 Orang/ Bulan	109.250.222.367,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		110.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Dokumen	1.187.589.029,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	40.729.900,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian*				100 %	878.750.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		910.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				350 Paket	878.750.000,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		910.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	25.000.000,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		467.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI (RUMAH SAKIT)***				**100 %**	**27.523.926.465,00**							**27.955.000.000,00**	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*1. Rumah sakit rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar; 2. Rasio Daya Tampung RS Rujukan"*				1). 5; 2) 60 1) RS; 2) %	2.867.710.480,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.805.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)														
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan				5 Layanan	199.998.000,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				15 Dokumen	667.712.580,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan				4 Paket	1.999.999.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*				100 %	24.008.831.185,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		24.790.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				100 Orang	500.020.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		530.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Administrasi Umum*				100 %	225.541.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		226.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	225.541.200,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		226.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	3.262.776.249,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		3.230.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	1.210.200.000,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				15 Laporan	2.052.576.249,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		2.010.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Daerah Dalam Kondisi Baik*				100 %	579.690.000,00			-	-	-		1.032.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	499.690.000,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	55.000.000,00	- Kota Manado, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	500.250.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	300.107.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	509.614.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	99.999.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	200.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	499.250.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		510.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	999.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	20.000.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	199.986.985,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas				1 Dokumen	99.977.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				5 Unit	99.825.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Presentase Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi*				100 %	149.675.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				5 Dokumen	149.675.800,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		155.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Presentase Rumah Sakit UPTD provinsi yang terakreditasi*				100 %	497.709.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				10 Unit	497.709.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***RASIO DOKTER PER SATUAN PENDUDUK***				**45/100.000 Rasio Penduduk**	**954.524.612,00**							**1.025.000.000,00**	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	*Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi*				15 Dokumen	464.657.312,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		505.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				20 Orang	299.999.912,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi				15 Orang	164.657.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	*Jumlah sertifikat sumber daya manusia (SDM) di Bidang Kesehatan*				100 Sertifikat	489.867.300,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				50 Orang	194.015.900,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				5 Dokumen	295.851.400,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		310.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***PERSENTASE KETERSEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN***				**100 %**	**199.996.200,00**							**255.000.000,00**	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	*Presentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang mendapatkan pengakuan*				100 %	199.996.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		255.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan				50 Sarana	199.996.200,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah	-		255.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	JUMLAH							**144.103.746.022,00**							**147.188.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini bertujuan untuk merumuskan program-program pembangunan kesehatan serta penjabaran pendanaan dalam kurun waktu tahun 2024, serta merupakan acuan atau pedoman para pemegang program sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan, terutama dalam hal keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan program.

Dalam pelaksanaan pogram-program pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tetap mengutamakan kegiatan pembangunan kesehatan pada upaya kesehatan promotif dan Preventif, yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya kuratif dan rehabilitative SERTA menyikapi kebijakan nasional atas dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sulawesi Utara.

Komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 ini sangat diperlukan. Sehingga pelaksanaan pembangunan yang mengacu kepada RKPD Sulawesi Utara Tahun 2024 mampu mendukung tercapainya Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, yakni "SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA DI ASIA PASIFIK".

Manado, Maret 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

dr. DEBIE K.R. KALALO, MSc. PH
PEMBINA UTAMA MUDA/IVB
NIP. 19641103 199602 2 001